

MEMAHAMI POLITIK #3

YESI MARINCE, M.SI

Sosiologi
politik

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

CARA MEMANDANG ILMU POLITIK

Ilmu yang masih muda jika kita memandang Ilmu Politik semata-mata sebagai salah satu Ilmu Sosial, Lahir pada abad ke-19, berkembang berdampingan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, anthropologi dan psikologi.

Ilmu sosial yang paling tua jika kita memandang Ilmu Politik sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek kehidupan politik.

Pada taraf ini Ilmu Politik bersandar pada sejarah dan filsafat.

CONTOH : Masa Yunani Kuno sudah muncul pemikiran mengenai negara. *Ahli Sejarah ; Herodotus, ahli filsafat; Plato, Aristoteles, dsb.*

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK ABAD 18 & 19:

Di Eropa :

banyak dipengaruhi Ilmu Hukum, karenanya fokus perhatiannya hanya negara. Bahasan tentang negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara. Pengaruh Ilmu hukum, filsafat dan sejarah masih terasa sampai PD II.

Di Amerika :

Mula-mula tekanan yuridis masih mempengaruhi bahasan politik, tapi kemudian muncul keinginan membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri atas pengumpulan data empiris.

Karena berkembang bersamaan dengan sosiologi dan psikologi, maka dalam perkembangannya metodologi dan terminologi ilmu politik banyak dipengaruhi kedua cabang ilmu sosial ini.

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK SETELAH PD II :

Di berbagai negara banyak pendirian fakultas ilmu sosial dan politik. Perkembangannya cukup pesat dan konsep-konsep ilmu politik yang baru banyak muncul dan dikenal.

Penyebab :

Ada dorongan kuat dari badan-badan internasional, terutama UNESCO. Karena tidak adanya keseragaman dalam terminology dan metodologi dalam Ilmu Politik, tahun 1948 UNESCO mengadakan suatu survey tentang kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara.

Hasil di atas dibahas dalam pertemuan di Paris (1948) dan menghasilkan buku *CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE*, dan ditindaklanjuti dengan penelitian mendalam dan menghasilkan buku *THE UNIVERSITY TEACHING OF SOCIAL SCIENCES : POLITICAL SCIENCE*.

ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

Politik sebagai ilmu yaitu suatu studi yang mempelajari negara/pemerintah dan gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat sebagai objeknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat, dan tergolong dalam ilmu sosial.

PERTEMUAN PARIS 1948 menghasilkan bahwa ilmu politik yaitu keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu.

Karena banyak ahli yang tidak puas dengan definisi di atas. Mereka mengharap agar ILMU POLITIK menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala dan peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat timbullah **PENDEKATAN BEHAVIORAL** .

Tokoh : Gabriel A. Almond, David Easton, David Truman, Robert Dahl, dsb.

Politik sebagai Ilmu Pengetahuan :

Dalam perkembangannya terjadi berbagai pandangan/pendekatan terhadap politik sebagai ilmu:

Kaum Tradisionalis	Kaum Behavioralis
Nilai-nilai dan Norma-norma Filsafat Ilmu Terapan Historis-Yuridis Tidak Kuantitatif	Menekankan Fakta Penelitian Empiris Ilmu Murni Sosiologis-Psikologis Kuantitatif

KONSEP-KONSEP POKOK KAUM BEHAVIORALIS :

1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
2. Generalisasi-generalisasi ini harus dapat dibuktikan (diverifikasi) kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan (mereduksi pendapat negatif mengenai apakah politik itu sebenarnya).

3. Pengumpulan dan penafsiran data harus menggunakan teknik penelitian yang cermat.
4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian perlu pengukuran dan kuantifikasi.

5. Dalam menganalisa, sedapat mungkin tidak menggunakan nilai-nilai pribadi si peneliti.
6. Penelitian politik bersifat terbuka terhadap konsep, teori, dan ilmu sosial lainnya. Dalam interaksi dengan ilmu sosial lainnya masuk istilah-istilah sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, sosialisasi politik disamping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, institusi, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan.

Sering terjadi konflik intelektual dimana kedua belah pihak meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing2 untuk meneliti kembali rangka, metode dan tujuan ilmu politik.

Tidak ada pihak yang menang, namun hasil dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik yang lebih mendalam. Pendekatan tradisional tetap punya peranan pokok tapi tidak lagi jadi pendekatan tunggal yang dominan.

TIMBUL “REVOLUSI POST-BEHAVORALIS”

- 🌐 Lahir di Amerika pada decade 60-an ketika berlangsung perang Vietnam dan munculnya kemajuan teknologi di bidang persenjataan, dan adanya diskriminasi ras yang melahirkan gejolak sosial yang luas.
- 🌐 REAKSI POST-BEHAVORALIS ditujukan pada usaha mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni, sesuai dengan pola ilmu eksakta (pembuktian kebenarannya= harus secara empiris)

POKOK-POKOK REAKSI :

1. Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah social yang dihadapi. Padahal relevansi dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat
2. Karena penelitian sifatnya abstrak, ilmu politik hilang kontak dengan realitas sosial. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri mengatasi krisis yang dihadapi manusia

3. Penelitian tentang nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik
4. Para cendekiawan punya tugas melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah sosial. Pengetahuan bertanggung jawab bertindak, “*engaged*” atau “*committed*” untuk mencari jalan keluar dari krisis

Sir Frederick Pollock dalam *An Introduction to The History of The Science of Politics* membagi Politik ke dalam :

Politik Teoritis	Politik Praktis
■ Teori Negara ■ Teori Pemerintah ■ Teori Perundang-Undangan ■ Teori Negara Sbg Pribadi Buatan (<i>artificial person</i>)	■ Negara (yaitu bentuk-bentuk negara yang nyata dari pemerintah ■ Pemerintahan (cara bekerja pemerintah, ketataprajaan, dll) ■ Undang-Undang dan Perundang-Undangan (prosedur, pengadilan dan sebagainya) ■ Negara yang dipribadikan (diplomasi, diplomasi, perdamaian, peperangan, persetujuan-persetujuan internasional)